

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Realisasi Anggaran Pada Satuan Kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Di Wilayah Jakarta Barat

Lawe Anasta ¹⁾; Dedi Purwadi ^{2*)}

¹⁾ lawe.anasta@mercubuana.ac.id, Universitas Mercu Buana

^{2*)} abimanyualfarosi@gmail.com, Universitas Mercu Buana

^{*)} Corresponding Author

Article Info:

Keywords:

Procurement Of Goods And Services;
Budget Planning;
Human Resources;
Performance-Based Budgeting Systems;
Budget Realization

Article History:

Received : 2018-12-26
Revised : 2020-04-28
Accepted : 2020-06-21

Article Doi:

<http://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i2.004>

Abstract

The low absorption of the budget as a manifestation of the estimated performance to be achieved during a certain period of time and expressed in financial terms has an impact on the slow realization of the implementation of government programs and activities. This is especially true if this occurs in the work unit for the state's confiscated objects storage house which is the place for storing state confiscated objects for the purposes of judicial proceedings. This study aims to examine the effect of procurement of goods and services, budget planning, human resources, performance-based budgeting systems on budget realization in the work unit for storing confiscated objects of the state of West Jakarta. The sampling technique used purposive sampling method of 100 respondents. The data collection method is a survey using a questionnaire distributed to respondents. Data were analyzed using multiple regression analysis. The results of this study conclude that: procurement of goods and services, human resources and performance-based budgeting systems have a significant positive effect on budget realization, while budget planning has a negative and insignificant effect on budget realization.

Abstrak

Rendahnya penyerapan anggaran sebagai perwujudan tentang estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Apalagi hal ini jika terjadi pada satuan kerja rumah penyimpanan benda sitaan negara yang merupakan tempat penyimpanan benda sitaan negara untuk keperluan proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran, sumber daya manusia, sistem anggaran berbasis kinerja terhadap realisasi anggaran pada satuan kerja rumah penyimpanan benda sitaan negara Jakarta Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yaitu survei dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia dan system anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran, sedangkan perencanaan anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap realisasi anggaran.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa; Perencanaan Anggaran; Sumber Daya Manusia; Sistem Anggaran Berbasis Kinerja; Realisasi Anggaran.

PENDAHULUAN

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan pengertian penyerapan yang dimaksud di sini adalah realisasi dari anggaran. Secara umum penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu. Secara lebih mudah orang awam mengatakan pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan, maka penyerapan anggaran disini dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu. (Malahayati, et.al, 2015) Lambatnya penyerapan anggaran menjadi salah satu masalah klasik, yang terus terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Penyerapan anggaran di awal tahun (triwulan pertama) begitu kecil tetapi mengalami peningkatan yang signifikan di akhir tahun (triwulan keempat). Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Pratama, 2013). Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. (Putri, 2014). Padahal, peraturan daerah tentang APBD telah disahkan sejak akhir Desember tahun sebelumnya sehingga program dan kegiatan seharusnya dapat segera dilaksanakan sejak awal tahun (Aini, 2016). Realisasi anggaran menjadi hal yang penting bagi instansi pemerintah karena menjadi salah satu tolok ukur kinerja SKPD.

Salah satu SKPD di Wilayah Jakarta Barat yang mengalami rendahnya penyerapan anggaran adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan yang merupakan tempat penyimpanan benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Rupbasan Jakarta Barat periode Tahun 2012 hingga tahun 2016, penyerapan anggaran semester pertama yang sangat rendah yaitu dibawah 50 persen kecuali di Tahun Anggaran 2016 yang mencapai 50,08%. Fenomena yang terjadi di Rupbasan Jakarta Barat ini menunjukkan penyerapan anggaran belum optimal. Begitu juga di semester kedua Tahun Anggaran 2016, penyerapan anggaran tertinggi sebesar 98,26%. Kondisi terburuk terjadi di Tahun Anggaran 2015 daya serap anggaran belanja hanya mencapai 10,01% di semester pertama dan 24,34 di semester kedua. Hal ini dikarenakan rendahnya penyerapan belanja modal berupa pembangunan gudang umum Rupbasan Jakarta Barat.

Zakiati (2016) menyatakan pelaksanaan anggaran mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh beberapa Pemda adalah pencairan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Sinaga (2016), yang mengungkapkan rendahnya penyerapan anggaran terjadi akibat adanya ketakutan yang berlebihan dari masing-masing aparaturnya di berbagai institusi terkait dengan penggunaan anggaran. Herriyanto (2012) menyatakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum diberlakukannya E Proc memerlukan waktu cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga pengumuman pemenang lelang. Sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya daya serap anggaran belanja. (BPKP 2011) menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan penyerapan anggaran, penganggaran memiliki peran yang sangat penting, karena jika dilakukan dengan baik akan memudahkan dalam pelaksanaan anggarannya. Perencanaan anggaran yang tidak baik sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga harus direvisi atau bahkan tidak dapat direalisasi sama sekali (Hariani & Veny, 2018). Pola mutasi pegawai juga dapat mengakibatkan keterlambatan realisasi anggaran. Pegawai atau pejabat yang mengelola keuangan di satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI apabila dipindahkan ke seksi atau kantor lain, maka diperlukan pengganti pegawai atau pejabat

tersebut. Menurut pendapat Sinaga (2016), dengan pergantian sumber daya manusia atau karyawan di masing-masing kementerian-lembaga membuat sistem aplikasi rawan blank yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran kementerian-lembaga. Aldina (2016) menunjukkan bahwa sistem anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran tetapi berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara sistem anggaran berbasis kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran, sumber daya manusia, sistem anggaran berbasis kinerja terhadap realisasi anggaran.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana ini merupakan pengembangan dari teori perilaku balasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori perilaku terencana merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan menjelaskan determinan perilaku tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori perilaku terencana, yang bisa digambarkan perencanaan anggaran sangat mempengaruhi capaian realisasi anggaran. Semakin meningkatnya akurasi perencanaan anggaran maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran. *Theory of Planned Behavior* dapat mendorong seseorang yang bekerja pada instansi pemerintah untuk membuat perencanaan program kegiatan dengan baik (sikap) dan berusaha agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu (norma subjektif) (Saryanto, 2017). Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (persepsi kontrol keperilakuan). Pelaksanaan program kegiatan tersebut didanai dari APBD dan tercermin dalam laporan realisasi anggaran.

Teori Stewardship

Pada teori stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro-organisational, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principal* dimana para steward berada. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan *principal* tidak sama, *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima. Dalam penelitian ini para pembuat kebijakan berlaku sebagai *principal* sedangkan pelaksana anggaran berlaku sebagai *steward* (Saryanto, 2017). teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana kompetensi sumber daya manusia sebagai *steward* yang termotivasi pada *principal* (realisasi anggaran belanja). Teori Stewardship menangkap kondisi praktik manajemen kontrak prinsipal yang berevolusi dan selaras yang mungkin tampak seperti antara organisasi pemerintah dan nonprofit Van Slyke (2006).

Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk menemukan sumber persediaan barang/jasa ketika organisasi membutuhkan barang/jasa pada harga termurah dan dalam batas kualitas yang dapat diterima (Lee, 2010). Pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada perolehan barang/jasa oleh organisasi pemerintah atau sektor publik (Uyarra & Flanagan, 2010). Penyerapan anggaran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang

rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah (Juliani, 2014). Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Republik Indonesia, 2004). Lamanya proses pengadaan barang jasa, ketakutan pejabat pengadaan terhadap aparat pemeriksa, kurangnya pejabat pengadaan yang bersertifikasi, serta kehati-hatian dalam proses pengadaan, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran belanja pemerintah (Aini, 2016).

Perencanaan Anggaran

Perencanaan adalah unsur penting dalam sebuah organisasi (Gagola et al, 2016). Baik organisasi publik atau organisasi privat, perencanaan merupakan acuan dan penentuan segala aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Aktivitas perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan paling krusial dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah (Nugroho, 2015). Sebab seluruh kegiatan yang perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari perencanaannya. Perencanaan dapat dikatakan berjalan dengan baik bila tahapan-tahapan di dalamnya dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan tujuan dengan tingkat penyimpangan minimal serta hasil akhir maksimal (Dewi, 2017). Aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik. Sejalan dengan Miliasih (2012) pelaksanaan anggaran akan tercapai dengan baik apabila perencanaan anggaran sudah dilaksanakan dengan baik.

Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari pegawai pada bagian penyusunan anggaran SKPD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban (Octariani et. al., 2017). Oleh karena itu perlu rasanya untuk lebih menekan kompetensi apa yang harus dikuasai sumber daya manusia dalam organisasi, agar dapat dinilai sebagai wujud dari hasil pelaksanaan tugas yang berdampak langsung terhadap pengalaman (Sudasri, 2016). Menurut pendapat Sinaga (2016), dengan pergantian sumber daya manusia atau karyawan di masing-masing kementerian-lembaga membuat sistem aplikasi rawan blank yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran kementerian-lembaga. Semakin tinggi tingkat kemampuan sumber daya manusia dalam sebuah SKPD maka akan menyebabkan tingkat penyerapan anggaran tinggi (Mutmainna dan Iqbal 2017).

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Saridewi et.al. (2013), didalam menerapkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja Dinas Pekerjaan Umum memerlukan birokrat dan program yang akuntabel, efektif dan juga efisien, sehingga realisasi anggaran nantinya pasti akan efektif pula. Pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang terbaik (Octariani, 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar dengan kajian dari prinsip-prinsip pokok anggaran berbasis kinerja adalah transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien (Saridewi, 2013).

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kausal. Penelitian Kausal adalah penelitian untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh satu atau beberapa variabel (Variabel Independen) terhadap variabel lainnya (Variabel dependen). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pejabat yang berwenang pada masing-masing satker. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari Rupbasan Jakarta Barat yang berupa peraturan-peraturan dan laporan-laporan periodik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengadaan barang/jasa dengan nilai t-statistik sebesar $2.710 > 1.96$ dan nilai p-value sebesar 0.003 (lebih kecil dari 0.05). Hal ini berarti hipotesis pertama (H_1) diterima, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan variabel perencanaan anggaran dengan nilai t-statistik sebesar $2.055 > 1.96$ dan nilai p-value sebesar 0.020 (lebih besar dari 0.05). Hal ini berarti hipotesis kedua (H_2) diterima, hasil penelitian ini membuktikan perencanaan anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap realisasi anggaran. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan variabel sumber daya manusia dengan nilai t-statistik sebesar $3.353 > 1.96$ dan nilai p-value sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Hal ini berarti hipotesis ketiga (H_3) diterima hasil penelitian ini membuktikan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan variabel anggaran berbasis kinerja dengan nilai t-statistik sebesar $5.175 > 1.96$ dan nilai p-value sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Hal ini berarti hipotesis keempat (H_4) diterima, hasil penelitian ini membuktikan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukkan bahwa variable pengadaan barang/jasa berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran. Sejalan dengan penelitian sejalan dengan Putri (2014); Mutmainna (2017); Sudarwati (2017); Miliasih (2012); Taufik et.al. (2016); Ruwaida et.al (2015); Febrianti (2015); Herriyanto (2012); Aini (2016) dan Rerung (2017), namun tidak sejalan dengan penelitian Nugroho (2017).

Hasil pengujian berikutnya yaitu variable perencanaan anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap realisasi anggaran. Sejalan dengan penelitian Nugroho (2017), namun tidak sejalan dengan penelitian Saryanto (2017); Mutmainna (2017); Sudarwati et.al. (2017); Sudasri (2016); Putri et.al (2017); Ruwaida (2015); Astuti et.al (2018); Zarinah (2016); Malahayati et.al (2015); Heriberta (2018); Dewi (2017); Alumbida (2016); Herriyanto (2012); Miliasih (2012); Sinaga (2016); Octariani (2017); Aini (2016) dan Rerung (2017).

Kemudian, hasil pengujian variable sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saryanto (2017); Putri (2014); Mutmainna (2017); Sudarwati et.al. (2017); Sudasri (2016); Putri et.al (2017); Ruwaida (2015); Febrianti et.al. (2015), Zarinah (2016), Malahayati et.al. (2015); Fitriyani (2015); Alumbida (2016); Herriyanto (2012); Miliasih (2012); Sinaga (2016); Octariani (2017); dan Aini (2016). Namun tidak sejalan dengan penelitian Rifai et.al. (2016); Nugroho (2017); Heriberta (2018); Dewi (2017); dan Rerung (2017),

Hasil pengujian berikutnya menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Aldina (2016), Saridewi (2013), Octariani (2017), Silalahi (2012). Namun tidak sejalan dengan Tamasoleng (2015) dan Ratna (2013).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran, perencanaan anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap realisasi anggaran, sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi anggaran. Kemudian berdasarkan keterbatasan penelitian, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan menambah populasi dan objek penelitian dan memperpanjang periode waktu penelitian. Untuk pemerintahan diharapkan memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan penyerapan anggaran, dengan cara terus memperbaiki proses perencanaan anggaran dengan menetapkan analisis standar biaya dan standar pelayanan minimal. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai pengelola keuangan dapat dilakukan dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur tetap pegawai dan berbagai pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, & Noor, R. (2016). *Analisis Kecenderungan Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Bantul)*. Universitas Gajah Mada.
- Aldina, I. (2017). Pengaruh Kualitas DIPA, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada Skpd Di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(1). Retrieve from: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2359>.
- Arif, E. (2014). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- BPKP. (2011). Paris Review. *Menyoal Penyerapan Anggaran*, 1–56.
- Endrayani, K. S., Adiputra, I. M. P., & Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 2(1). doi:<http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v2i1.3390>
- Fitriany, N., Masdjojo, G. N., & Suwarti, T. (2015). Exploring The Factors That Impact The Accumulation of Budget Absorption In The Fiscal Year 2013: A Case Study in Pekalongan City of Central Java Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 7(3), 1–8.
- Herriyanto, H. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta (Doctoral dissertation, Thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia).
- Ford, N. (1989). From Information-to Knowledge-Management: The Role of Rule Induction and Neural Net Machine Learning Techniques in Knowledge Generation. *Journal of Information Science*, 15(4–5), 299–304.

- Gagola, L., Sondakh, J., & Waringan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>.
- Juliani, D., & Sholihin, M. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 177–199. <https://doi.org/10.21002/jaki.2014.10>.
- Hariani, S., & Veny, V. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Dan Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Walikota Jakarta Barat). *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 11(2), 273-283. DOI:<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.008>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2015). Rencana Strategi Pemasyarakatan 2015-2019. *Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*.
- Kementerian Keuangan RI. (2013). Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia. *Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran*.
- Lee, M. J. (2010). An Exploratory Study on the Mature Level Evaluation of E-Procurement Systems. *Journal of Public Procurement*, 10(3), 405–427.
- Love, P. E. ., Davis, P., Edwards, D. J., & Baccarini, D. (2008). Uncertainty Avoidance: Public Sector Clients and Procurement Selection. *International Journal of Public Sector Management*, 21(7), 753–776.
- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 11–19.
- Miliasih. (2012). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga T.A. 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Universitas Indonesia.
- Mutmainna, & Iqbal, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Assets*, 7(1), 120–132.
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK*, 10(1), 22–37.
- Nugroho, B. (2015). *Mengenal Lebih Dekat Konsep Anggaran Daerah*. <https://konsultankti.wordpress.com/2015/08/27/mengenal-lebih-dekat-konsep-dasar-anggaran-daerah/>. Diakses tanggal 30 November 2018.
- Puspitasari, R. (2013). Studi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. *Jejaring Administrasi Publik*, 5(2), 356-369.
- Putri, C. T., & Fachruzzaman, F. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu).
- Putri, kadek M. R., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 8(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13679>

- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 54 tahun 2010. *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.*
- Pemerintah Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. *Kementerian Keuangan. Jakarta.*
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Kementerian Keuangan. Jakarta.*
- Pemerintah Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. *Kementerian Keuangan. Jakarta.*
- Pemerintah Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. *Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.*
- Pratama, A. (2013). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 2(2).
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. *Jakarta: Republik Indonesia.*
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati M., R. S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p01>.
- Seftianova, R., & Adam, H. (2013). Pengaruh Kualitas Dipa dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 75–84.
- Wijanarko, S. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013*. Universitas Indonesia.
- Sudastri, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Saryanto, E. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Palu*. Universitas Hasanudin.
- Silalahi, S. P. (2012). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kota Dumai). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru. Jurnal Ekonomi*, 20(3). Retrieve from: <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/1174>.
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran kementerian/Lembaga (K/L) Dan Pemerintah Daerah. *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 5(2).
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(1). 129-138. DOI: <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15332>.

- Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 97–110.
- Taufik, M., Darwanis, & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Belanja Modal (Studi Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara B. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 10–20.
- Uyarra, E., & Flanagan, K. (2010). Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement. *European Planning Studies*, 18(1), 123–14.
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.